

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI DISDUKCAPIL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

SYAZA CHAIRUNNISA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lampung Tengah, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori implementasi kebijakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) digunakan sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah mengarah pada pelayanan yang lebih inklusif. Disdukcapil Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan penyesuaian melalui penyediaan fasilitas fisik seperti jalur landai, toilet khusus, ruang tunggu, serta program jemput bola untuk penyandang disabilitas berat. Pemahaman terhadap prinsip nondiskriminasi juga mulai tumbuh di kalangan pelaksana. Akan tetapi, masih terdapat kendala yang signifikan, antara lain belum tersedianya dokumen teknis atau SOP khusus, keterbatasan fasilitas dan anggaran, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, serta kesenjangan akses digital. Hambatan-hambatan ini menyebabkan pelayanan belum merata, terutama bagi penyandang disabilitas di wilayah terpencil dan kelompok prasejahtera. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan membutuhkan dukungan sistemik berupa penguatan regulasi teknis, koordinasi kelembagaan, dan kebijakan afirmatif yang menyeluruh.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION POLICY NUMBER 10 OF 2013 CONCERNING SERVICES AND FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE DUKCAPIL OFFICE OF CENTRAL LAMPUNG REGENCY

By

SYAZA CHAIRUNNISA

This study aims to examine the implementation of Regional Regulation Number 10 of 2013 concerning Services and the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities at the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) of Central Lampung Regency, as well as to identify the obstacles encountered during its implementation. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. The policy implementation theory by Mazmanian and Sabatier (1983) is used as the analytical framework. The findings reveal that the policy implementation has moved towards more inclusive services. Disdukcapil of Central Lampung Regency has made adjustments through the provision of physical facilities such as ramps, special toilets, waiting areas, and outreach programs for individuals with severe disabilities. Awareness of the principle of non-discrimination has also started to grow among implementers. However, several significant challenges remain, including the absence of technical documents or specific SOPs, limited facilities and budget, suboptimal cross-sectoral coordination, and digital access gaps. These barriers have resulted in unequal service delivery, especially for persons with disabilities in remote areas and underprivileged groups. Therefore, the success of policy implementation requires systemic support in the form of strengthened technical regulations, institutional coordination, and comprehensive affirmative policies.

Keywords: Policy Implementation, Persons with Disabilities, Regional Regulation